



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNITA SARI
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 868357

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, WARISAN Rp. 750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	57.000.000
1. MOBIL, ETIOS VALCO 1.2 E M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
2. MOTOR, HONDA NC11B3CA/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
3. MOTOR, HONDA X1B02N04LO A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
4. MOTOR, YAMAHA YAMAHA MX KING Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	500.880.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	193.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.501.380.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.501.380.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.